

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kinerja aparat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu indikator mekanisme tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah sejauh mana pelayanan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Tercapainya pelayanan aparat pemerintah di segala bidang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelayan masyarakat (publik), aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan penyelenggara pemerintah bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian seluruh jajaran aparat pemerintah, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Pelayanan aparat pemerintah daerah meliputi pelayanan aparat pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah yang ada di desa, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Berdasarkan peraturan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemerintahan desa diarahkan pada kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah desa. Dalam hal ini masyarakat desa sebagai subyek

pembangunan diharapkan mendapat pelayanan yang baik dari aparat pemerintah desa berdasarkan kepentingan yang harus dipenuhi.

Perlunya pelayanan yang optimal dari aparat pemerintah desa, berkenaan pula dengan tugas dan wewenang aparat. Aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah di wilayah desa diharapkan dapat melayani masyarakat secara adil dan merata karena pelayanan berkenaan pula dengan tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab aparat pemerintah.

Keberadaan masyarakat miskin dalam suatu wilayah seyogyanya mendapat pelayanan yang baik agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan harapan. Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena bagaimanapun masyarakat miskin merupakan bagian dari unsur yang merupakan tanggung jawab pemerintahan suatu negara. Hal ini dikukuhkan dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Pasal 33 yang berbunyi "pakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara"

Berdasarkan undang - undang tersebut, pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek kepentingan masyarakat miskin sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan adil dan merata. Di samping itu pula diperlukan peningkatan kualitas pelayanan yang berpijak pada kebijakan - kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela, 2006:3) bahwa "pada dasarnya pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kepada masyarakat diberikan seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat" Dari pendapat ini tampak

bahwa aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seyogyanya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Demikian pula dengan pelayanan kepada masyarakat miskin seyogyanya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin secara optimal karena berdasarkan akses kebutuhan yang sejalan dengan pembangunan.

Untuk mencapai pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat miskin sesuai yang diharapkan diperlukan prosedural pelayanan aparat pemerintah yang sesuai dengan karakteristik pembangunan dan masyarakat setempat. Setiap kebijakan pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan masyarakat dalam suatu wilayah, Moeljarto Tjokrowinoto (dalam, Dawali, 2006:1) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan serangkaian upaya pemerintah untuk memajukan masyarakat sesuai kondisi kawasan dengan konsep tertentu.

Persoalan yang dihadapi di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan masyarakat desa adalah keberadaan pelayanan aparat desa kepada masyarakat miskin. Program-program pengentasan kemiskinan yang ditunjukkan kepada masyarakat miskin belum dilaksanakan dengan baik. Sebagian besar masyarakat miskin belum terlayani dan disentuh oleh program-program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah.

Keadaan memerlukan perhatian dari seluruh *stake holder* pemerintahan yang ada di desa, karena bagaimanapun masyarakat miskin merupakan bagian dari masyarakat yang harus diberikan layanan dengan baik sesuai kebutuhannya sehingga dapat hidup layak sesuai dengan amanat undang-undang. Segala

kurangan dan keterbatasan masyarakat miskin seyogyanyamenjadi perhatian aparat desa sehingga masyarakat miskin akan hidup dan memenuhi kebutuhan yang layak sebagaimana masyarakat lainnya.

Program-program yang telah digulirkan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, selayaknya dapat dilaksanakan pemerintah desa dengan adil dan merata dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Jauh jauh hari program-program pemerintah telah digulirkan dalam upaya pengentasan kemiskinan diantaranya adalah;1) Pelayanan Kesehatan Gratis (Jamkesmas), 2) Pelayanan Beras Miskin (Raskin), 3) Pelayanan Pendidikan Gratis (9 Tahun), Pelayanan Bantuan Usaha Kecil (UKM) dan sebagainya.

Fenomena yang nampak bahwa kegiatan penyelenggaraan pelayanan aparat pemerintah desa kepada masyarakat miskin belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tampak pada belum meratanya program-program yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat miskin dapat diterima secara adil. Bantuan-bantuan sosial yang diterima masyarakat miskin tidak sesuai dengan keberadaan masyarakat miskin itu sendiri.

Masalah lain yang nampak adalah tidak ada upaya dari pemerintah desa untuk membebaskan pungutan biaya administrasi bagi masyarakat miskin dalam mengurus akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan perizinan-perizinan lain oleh pemerintah setempat. Di samping itu belum semua masyarakat miskin terdaftar sebagai peserta Jamkesmas sehingga tidak mendapat pelayanan gratis dalam melakukan pengobatan.

Persoalan ini merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah pelayanan aparat pemerintah bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu peneliti merasa diperlukan analisis tentang pelayanan aparat pemerintah desa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang dilaksanakan aparat pemerintah desa dalam melayani kebutuhan masyarakat miskin.

Pentingnya analisis pelayanan aparat pemerintah desa bagi masyarakat miskin karena berkenaan dengan tanggung jawab aparat pemerintah desa sebagai aparatur negara dalam memerankan kiprahnya mengimplementasikan program program bantuan sosial terhadap pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri serta mendukung kelancaran pembangunan pengentasan kemiskinan secara kompleks.

Perhatian terhadap pelayanan aparat pemerintah bagi masyarakat miskin bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi termasuk pula pemerintah daerah di kecamatan dan aparat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa adalah aparat pemerintahan yang terkecil di daerah, namun memerlukan perhatian karena desa merupakan wilayah pemerintahan yang sangat penting dalam pembangunan daerah.

Kinerja penyelenggaraan aparat pemerintah desa diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang optimal kepada masyarakat miskin di bawa komando Kepala Desa dan dipantau oleh BPD dan LPM. Kegiatan pelayanan aparat pemerintah di desa dikendalikan dan terpusat di Kantor Desa sehingga dapat terfokus dan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan

prosedural dan pengelolaan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab aparat yang ada di desa.

Sistem bekerjanya aparat pemerintah desa memerlukan perhatian karena berkenaan dengan proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Pada pelaksanaannya menyangkut pengelolaan dan cara bekerjanya aparat desa sangat erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pemerataan pelayanan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan aparat pemerintah desa bagi masyarakat miskin sangat penting dikaji secara detail dari berberbagai aspek dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Dari uraian ini tampak bahwa dalam melaksanakan pelayanan aparat desa diharapkan dapat dilakukan dengan baik dari untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin secara optimal.

Kenyataan ini yang ditemui di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan data yang dihimpun pada penelitian pendahuluan, di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo memiliki penduduk sebanyak 1.452 jiwa yang terdiri dari 357 kepala keluarga dan dari jumlah tersebut, terdapat 96 KK yang masih tergolong miskin.

Kenyataan lain yang dihadapi peneliti bahwa pelayanan aparat pemerintah desa bagi masyarakat miskin di desa ini belum tampak optimal. Sesuai dengan data awal yang diperoleh dalam observasi di desa sosial tampak bahwa pelayanan aparat pemerintah desa belum berlangsung sesuai harapan. Aparat pemerintahan desa belum optimal melayani masyarakat miskin. Fenomena ini tidak seiring

dengan Perda Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2004 Tentang Transpransai Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa pelayanan aparat pemerintah dilakukan sesuai prosedur dan berdampak pada kesejahteraan.

Indikator belum optimalnya pelayanan aparat pemerintah desa bagi masyarakat miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tampak proses pendataan dan proses pelaksanaan pelayanan. Selain itu pula prosedur pelayanan belum dilakukan dengan baik sehingga belum menjangkau masyarakat miskin. Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan formulasi judul: "Analisis Pelayanan Aparat Pemerintah Desa Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Proses pendataan dan verifikasi masyarakat miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo belum dilaksanakan dengan optimal.
- 1.2.2 Belum semua masyarakat miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo didata oleh aparat pemerintah desa sehingga belum memperoleh bantuan.
- 1.2.3 Prosedur pelayanan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo belum dilaksankana aparat dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelayanan aparat pemerintah Desa Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan aparat pemerintah Desa Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sosial Kecamatan Paguyama Kabupaten Boalemo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis kepada beberapa pihak yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan secara luas tentang pelayanan aparat pemerintah bagi masyarakat miskin.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi aparat desa khususnya di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin.